



EDISI SELASA 30 JUNI 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY

02

GOVERNMENTTODAY
Purbaya Isyaratkan Pajak Marketplace Mulai 1 Juli

04

NUSANTARA
Mendagri Tepis Isu Dua Desa Kaltara Dicaplok Malaysia

10

LISTSTYLE
Zodiak dan Gaya Berpakaian: Benarkah Outfit Gambarkan Kepribadian Seseorang?

MENGULITI ANGKA 43 RIBU PHK

Angka 43 ribu kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Juni 2026 bukan sekadar catatan statistik pemerintah. Melainkan gambaran tekanan besar yang sedang dihadapi dunia kerja nasional. Di balik jumlah tersebut terdapat ribuan pekerja yang kehilangan sumber penghasilan, perusahaan yang menghadapi beban operasional, serta kawasan industri yang mulai merasakan dampaknya. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan juga mencatat pada periode Januari-Mei tercatat 23.470 orang kehilangan pekerjaan. Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah PHK tertinggi mencapai 5.044 pekerja, disusul Banten dan Jawa Timur. Besarnya PHK di wilayah industri utama menunjukkan persoalan tidak hanya berada pada sisi pekerja, tetapi juga mencerminkan tekanan terhadap sektor manufaktur. Namun angka tersebut diperkirakan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi di lapangan karena masih ada pekerja kontrak, pekerja alih daya (outsourcing), serta sektor informal yang kehilangan pekerjaan tapi tam masuk dalam pencatatan resmi. Pemerintah kini menghadapi tantangan besar untuk tidak hanya menghitung jumlah pekerja yang kini nggagur. Tetapi juga mencegah agar angka tersebut tidak berkembang menjadi 'tsunami' PHK. BACA HAL 11...

Jumlah Pekerja Sampingan Lulusan D-4/S-1 (orang)

Tahun 2010: 419.265
Tahun 2025: 1.870.027

Jumlah Pekerja Sampingan

Kalangan Profesional

Tahun 2010: 116.436
Tahun 2025: 1.350.174

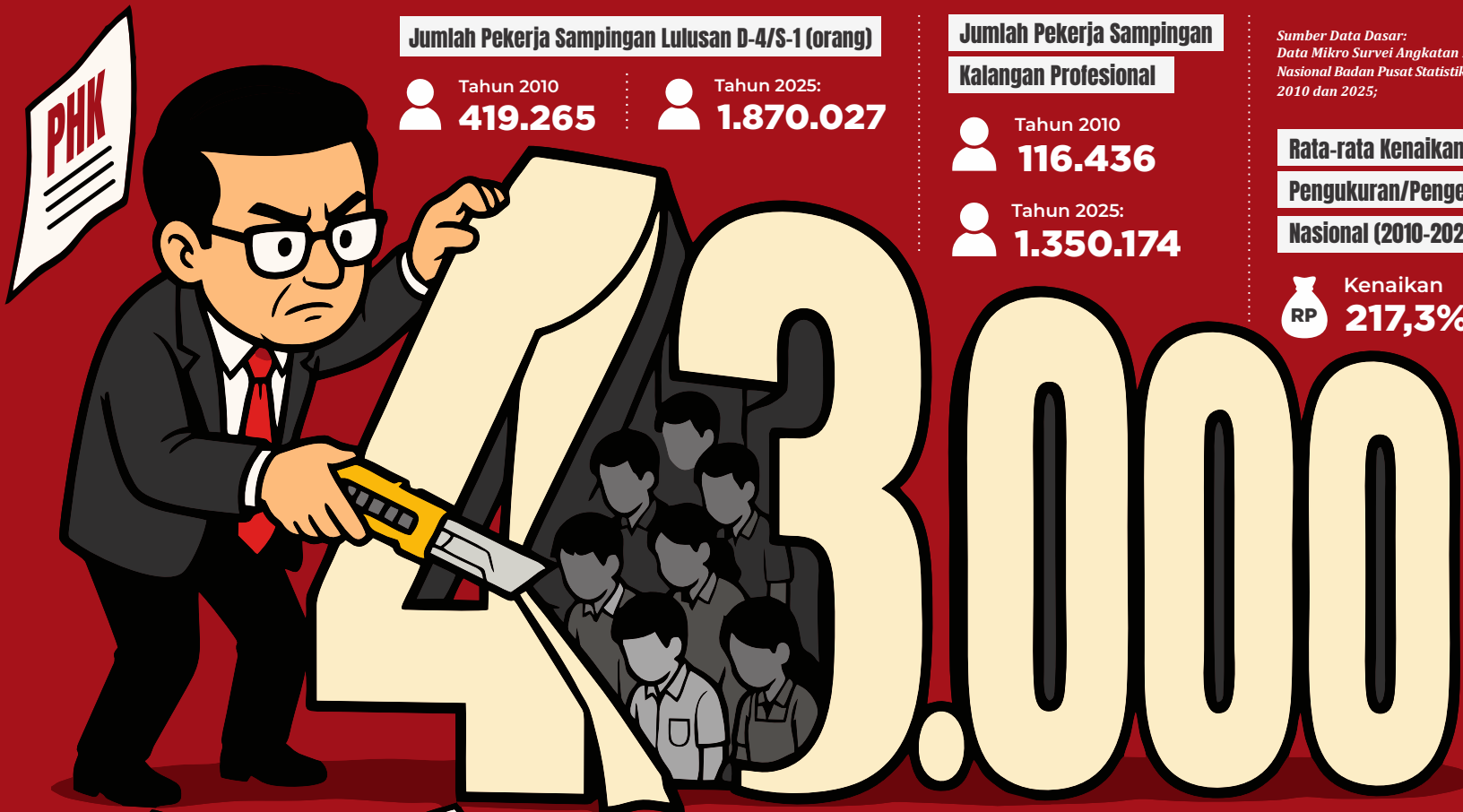
Sumber Data Dasar:
Data Mikro Survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik Agustus 2010 dan 2025;

Rata-rata Kenaikan

Pengukuran/Pengeluaran

Nasional (2010-2025)

Kenaikan
RP 217,3%



Tingkat Pengangguran

Kaum Muda

di Berbagai Negara

India 17,6%

Tiongkok 16,5%

Malaysia 9,9%

Indonesia 17,3%

Taiwan 11,0%

Hong Kong 9,9%

PURBAYA ISYARATKAN PAJAK MARKETPLACE MULAI 1 JULI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal kuat jika pemungutan pajak bagi pedagang online melalui platform marketplace akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Meski begitu, Purbaya menyebut masih akan melakukan pengecekan akhir bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelum pelaksanaan resmi diberlakukan.

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban penyedia marketplace untuk me-



Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

ATURAN PAJAK MARKETPLACE MULAI JULI 2026

1. Marketplace Jadi Pemungut Pajak

- Marketplace memungut, menyeter, dan melaporkan pajak pedagang online.

2. Pajak yang Dipungut

- PPh Pasal 22: 0,5% dari omzet kotor.
- Tidak termasuk PPN dan PPhBM.

3. Siapa yang Kena?

- Pedagang WNI yang berjualan barang/jasa melalui marketplace.
- Berlaku untuk transaksi dengan pengguna Indonesia.

4. Siapa yang Bebas?

- Pedagang pribadi dengan omzet ≤ Rp500 juta/tahun yang menyerahkan surat pernyataan.
- Jika omzet melebihi Rp500 juta, dikenai PPh 22 sebesar 0,5%.

5. Data yang Wajib Diserahkan

- NPWP/NIK.
- Alamat korespondensi.
- Surat pernyataan omzet (untuk pengecekan).

Transaksi yang Dikecualikan

- Pedagang omzet ≤ Rp500 juta (dengan surat pernyataan).
- Jasa kurir mitra aplikasi.
- Pemegang SKB Pph.
- Penjualan pulsa, kartu perdana, emas, batu permata resmi, serta pengalihan hak atas tanah/bangunan.



RENCANA penerapan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace mulai 1 Juli 2026 mendapat perhatian dari pengamat ekonomi dan pelaku industri digital. Kebijakan yang menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut pajak ini dinilai memiliki tujuan positif untuk menciptakan kesetaraan antara pedagang online dan offline, namun implementasinya perlu dilakukan secara hati-hati.

munut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto pedagang dalam negeri yang bertransaksi melalui platform digital.

"Mungkin mulai Juli, nanti saya akan double check dengan pajak (DJP). Tapi rasanya akan seperti itu, tapi itu bukan pajak tambahan," ujar Purbaya usai rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Senin (29/6/2026).

Saat ditanya mengenai kemungkinan penerapan tepat pada 1 Juli, Purbaya menjawab singkat, "Sepertinya itu."

Purbaya menjelaskan, kebijakan ini bukan untuk menambah beban pajak baru bagi pelaku usaha online. Menurutnya, mekanisme baru hanya mengubah cara pemungutan, dari sebelumnya dilakukan sendiri oleh

Pengamat Ingatkan Risiko ke UMKM, Industri Minta Masa Transisi

Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat menilai kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Dengan nilai transaksi e-commerce Indonesia yang mencapai sekitar Rp487 triliun pada 2024, potensi penerimaan pajak diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp1,2 triliun apabila sebagian besar transaksi berasal dari pelaku UMKM.

Meski demikian, Ariawan mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi sejumlah tantangan sebelum aturan diberlakukan penuh.

Menurutnya, tantangan utama berasal dari rendahnya literasi perpajakan pelaku UMKM, kesiapan sistem marketplace yang belum seragam, hingga potensi bertambahnya beban administrasi bagi penjual.

Ia juga menilai penerapan pajak marketplace bisa berdampak pada daya saing harga di platform digital. Selama ini, banyak konsumen

memilih berbelanja online karena harga yang lebih murah dibandingkan toko fisik.

"Survei menunjukkan sekitar 72% konsumen memilih belanja online karena harga lebih murah dibanding toko fisik. Jika di online harga tidak lagi kompetitif maka mereka akan kembali ke toko fisik," kata Ariawan.

Selain itu, Ariawan meminta pemerintah mewaspadai kemungkinan pelaku UMKM berpindah dari marketplace ke kanal penjualan lain seperti media sosial yang pengawasannya lebih sulit dilakukan.

Karena itu, ia menilai sosialisasi dan penerapan aturan perlu dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan tekanan baru bagi pelaku usaha.

Dari sisi industri, pelaku e-commerce meminta pemerintah memberikan masa transisi sebelum kebijakan berjalan penuh. (wid,ist/dya)

pedagang menjadi dipungut langsung melalui platform marketplace.

Purbaya mengungkapkan salah satu alasan kebijakan ini dijalankan karena adanya keluhan dari pelaku usaha konvensional atau toko offline. Para pedagang offline merasa perlakuan pajak antara bisnis fisik dan bisnis digital belum seimbang.

"Banyak pengusaha offline yang protes sama saya. Mereka bayar PPN (pajak pertambahan nilai), kok yang online enggak bayar?" kata Purbaya.

Menurutnya, penerapan pajak marketplace bertujuan menciptakan persaingan usaha yang lebih adil.

"Gara-gara hanya itu supaya menciptakan playing field yang lebih seimbang," ujar Purbaya.

Ia menegaskan marketplace bukan objek pajak baru, melainkan menjadi pihak yang ditugaskan untuk memungut pajak dari para pedagang yang berjualan di dalamnya.

"Marketplace enggak dipajakin, tapi PPN yang mereka biasa enggak bayar, sekarang bayar," kata Purbaya.

Pastikan Pajak Tak Naik dan Dobel

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana sebelumnya juga menyampaikan bahwa kebijakan tersebut mulai berlaku 1 Juli 2026.

"Ini kan di PMK yang sebenarnya tahun lalu sudah keluar tapi ditunda, baru diberlakukan nanti tanggal 1 Juli, sebelumnya hanya menugaskan platform sebagai pemungut pajak," ujar Temmy dalam acara UMKM Insight yang ditayangkan melalui kanal Kementerian UMKM Republik Indonesia.

Temmy menegaskan tidak ada perubahan tarif maupun kenaikan pajak bagi pedagang online.

"Tidak ada yang berubah, tidak ada kenaikan pajak, hanya yang tadinya kewajiban pajak ini tidak dipungut langsung oleh e-commerce, sekarang platform wajib memungut pajak dan berhubungan langsung dengan DJP nanti sistemnya," tuturnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti memastikan aturan baru tersebut tidak membuat pedagang online membayar pajak dua kali.

"Tidak ada pemotongan double. Bahkan sebetulnya maksudnya itu platform membantu para seller, kamu enggak usah repot-repot lagi bayar pajak sendiri," kata Inge.

Ia menjelaskan, selama ini pedagang online tetap memiliki kewajiban pajak masing-masing. Perbedaannya, mulai Juli 2026 pemungutan dilakukan oleh platform marketplace.

Untuk UMKM dengan omzet Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar, tarif Pajak Penghasilan tetap sebesar 0,5 persen sesuai ketentuan yang berlaku. Penghitungan omzet dilakukan secara kumulatif dari seluruh marketplace tempat pedagang berjualan. (tin,ist,rls/dya)

RUU SIBER DIBAHAS PEMERINTAH-DPR, DRAF DIRAHASIAKAN

Pemerintah dan DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS). Namun, meski proses pembahasan telah dimulai, draf aturan tersebut belum akan dipublikasikan ke masyarakat.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto meminta agar naskah rancangan yang disusun pemerintah tidak disebarkan terlebih dahulu dengan alasan berpotensi memunculkan informasi keliru.

"Untuk draf-draf ini sebaiknya tidak perlu keluar dulu karena nanti terlalu banyak hoaks," ujar Utut dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama pemerintah, Senin (29/6/2026).



Menurut politikus PDI Perjuangan itu, publikasi draf dapat dilakukan setelah pembahasan berjalan melalui sejumlah tahapan. Ia mengatakan, DPR dan pemerintah masih perlu memperdalam substansi sebelum membuka rancangan tersebut kepada masyarakat.

"Nanti kalau kami sudah bahas sampai tahapan, kalau memang dibutuhkan kami beri ke publik," kata Utut.

Pembahasan RUU KKS dilakukan

setelah pemerintah resmi mengajukan rancangan tersebut kepada DPR. Pemerintah dan Komisi I DPR kemudian sepakat membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas aturan yang akan menjadi dasar penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber nasional.

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukanta ditunjuk sebagai ketua panja. Keanggotaan panja berasal dari 23 anggota DPR serta perwakilan pemerintah. Utut meminta pemerintah menempatkan orang-

orang yang memahami praktik keamanan siber untuk terlibat dalam pembahasan.

"Ini barang baru, barang baru untuk undang-undang itu harus serius sekali. Ini bukan daily activities dan ini bukan yang sifatnya normatif. Ini menyongsong Indonesia masa depan," ujar Utut.

Ia menilai pembahasan RUU KKS tidak boleh dilakukan secara terburu-buru karena regulasi tersebut akan menjadi fondasi baru bagi keamanan digital Indonesia. Salah satu perhatian utama adalah pengaturan mengenai tindak pidana siber yang belum memiliki aturan khusus dalam perundang-undangan yang ada saat ini.

Pemerintah menyebut penyusunan RUU KKS dilatarbelakangi meningkatnya ketergantungan masyarakat dan negara terhadap ruang digital. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan kehadiran negara dalam melindungi ruang siber menjadi hal penting untuk menjaga ekosistem digital nasional.

"Kewajiban negara untuk hadir menjadi penting dalam melindungi ruang siber dan ekosistem digital, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemajuan keamanan dan ketahanan negara di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kemajuan peradaban bangsa, hingga peningkatan kesejahteraan nasional," kata Edward.

RUU KKS telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Pemerintah berharap aturan ini menjadi landasan hukum untuk melindungi infrastruktur informasi, khususnya infrastruktur informasi kritical yang menjadi target berbagai serangan siber.

Edward menjelaskan terdapat 10 pokok pengaturan dalam RUU KKS. Pertama, pengaturan keamanan siber pada infrastruktur informasi dan infrastruktur informasi kritical, termasuk kewajiban penyelenggara untuk melindungi sistem yang dimiliki, dikelola, atau dioperasikan.

Kedua, penguatan ketahanan siber melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, dan proses bisnis. Ketiga, kerja sama internasional dalam bidang keamanan dan ketahanan siber.

Selanjutnya, RUU ini mengatur penguatan peran pemerintah dalam penyusunan standar dan kebijakan keamanan siber nasional, pengembangan industri teknologi keamanan siber, pemberian penghargaan bagi penyelenggara infrastruktur yang memenuhi standar keamanan, hingga pemantauan anomali trafik internet.

"Penguatan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber dari penyusunan standar dan kebijakan nasional keamanan dan ketahanan siber, pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang meliputi pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi," ujar Edward saat membacakan materi RUU. (wid,rls,ant/dya)

STATISTIK VOLUME SERANGAN SIBER TAHUNAN

- 2026 (Jan-Apr)**
1,52 miliar serangan

Tren serangan tinggi terus berlanjut.
- 2025**
5,5 miliar serangan

Lonjakan drastis dipicu otomasi serangan berbasis AI.
- 2024**
609,3 juta serangan

Naik tajam, termasuk kelumpuhan Pusat Data Nasional.
- 2023**
279,8 juta serangan

Volume turun, namun terjadi serangan ransomware besar.
- 2022**
11 miliar serangan

Marak kebocoran data besar, termasuk kasus Bjorka.

Pengamat: Berpotensi Jadi UU Represif

partisipasi publik sejak awal, sulit berharap RUU KKS menghasilkan aturan yang berkualitas.

"Tidak akan mungkin publik bisa mengharapkan hasil UU yang berkualitas. Dan jelas UU dapat dikategorikan sebagai UU yang represif," ujar Charles, Senin (29/6/2026).

Menurut Charles, sikap DPR yang meminta draf tidak disebarkan bertentangan dengan prinsip keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. Ia mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan pentingnya partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation dalam setiap proses legislasi.

"Model pembahasan demikian bertentangan dengan asas keterbukaan. Di mana MK telah menggariskan bahwa keterbukaan sebagai pintu masuk partisipasi publik secara bermakna," kata Charles.

"Partisipasi diwajibkan MK sejak perencanaan, penyusunan dan pembahasan," lanjutnya.

Ia menilai pembahasan RUU KKS secara tertutup berpotensi mengulang pola lama dalam proses legislasi yang minim transparansi. Jika draf benar-benar tidak dibuka kepada publik, menurut dia, DPR kembali menjalankan model pembentukan undang-undang yang tertutup.

"Kalau ini benar adanya maka DPR kembali mempraktikkan model pembahasan UU yang tertutup penuh dengan konspirasi," ujar Charles.

Charles juga memperingatkan minimnya keterlibatan publik dapat membuat produk hukum tersebut mengalami persoalan secara formal. Ia menyebut kondisi itu bisa menjadi alasan munculnya gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

"Jelas cacat formal karena minim partisipasi publik. Namun, DPR sudah kebal dengan kritik publik. Karena perilaku demikian berulang lagi dan lagi. Pada akhirnya akan berujung kembali di MK," kata Charles. (wid,istrls/dya)

RENCANA pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) menuai kritik setelah Komisi I DPR RI meminta agar draf aturan tersebut belum dibuka kepada publik. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Charles Simabura menilai langkah tersebut berisiko membuat regulasi yang lahir menjadi undang-undang yang represif karena minim keterlibatan masyarakat.

Charles mengatakan, tanpa keterbukaan draf dan ruang

MENDAGRI TEPIS ISU DUA DESA KALTARA DICAPLOK MALAYSIA

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito Karnavian, secara tegas membantah isu liar yang berkembang di tengah publik mengenai lepasnya dua desa di Nunukan, Kalimantan Utara, ke wilayah kedaulatan Malaysia. Pergeseran yang terjadi murni hanya mencakup sebagian kecil bidang tanah, di mana Indonesia secara kalkulasi wilayah justru mendapat keuntungan geografis yang jauh lebih masif dari hasil kesepakatan tersebut.

DATA PERGESERAN

LAHAN (SIAPA UNTUNG?)



Sisi Malaysia: Mendapat 127,3 Hektare di Pulau Sebatik



Sisi Indonesia: Mendapat Kompensasi 5.700 Hektare di Sungai Simantipal.

Kesimpulan: Secara kalkulasi total, Indonesia diuntungkan.

MASALAH & ANCAMAN

- **Warisan Kolonial:** Batas zaman Belanda vs Inggris dahulu hanya digambar di atas peta, tanpa patok fisik di lapangan.
- **Kondisi Unik:** Ditemukan rumah warga yang bagian depannya di Indonesia, bagian belakangnya di Malaysia.
- **Dampak Kerawanan:** Memicu celah penyelundupan narkoba, senjata api, barang ilegal, hingga perdagangan orang (human trafficking).

SOLUSI PEMERINTAH

- **Kolaborasi Lintas Sektor:** BNPP menggandeng Kemlu, Kemenhan, TNI, Polri, BIN, BIG, hingga LAPAN.
- **Penguatan Fisik:** 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) telah dibangun, dan akan terus ditambah di titik krusial Kalbar, Kaltim, dan Kaltara.



Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito Karnavian.

garis batas memang berkonsekuensi pada masuknya sebagian lahan seluas 127,3 hektare di Pulau Sebatik ke sisi Malaysia. Namun, sebagai gantinya, Indonesia memperoleh kompensasi wilayah yang berkali-kali lipat lebih luas di titik lain.

"Yang dimaksud itu adalah 127 hektar itu ada di dua desa yang konsekuensinya masuk ke wilayah Malaysia, tapi kita mendapatkan kompensasi 5.700 hektar pada masuk ke dalam sisi Indonesia," kata Tito menjelaskan detail kompensasi yang didapat.

Jika dibedah secara rinci per segmennya, wilayah Indonesia justru bertambah signifikan. Di Pulau Sebatik sendiri disepakati lahan seluas 127,3 hektare berada di sisi Indonesia dan Malaysia hanya mendapatkan 4,9 hektare. Keuntungan terbesar berada di segmen Sungai Simantipal, di mana seluruh wilayah seluas 5.700 hektare disepakati mutlak masuk menjadi milik Indonesia.

Bergerak ke segmen Sungai Sinapat dan B2700-B3100, Indonesia mengamankan lahan seluas 5.207 hektare, sementara Malaysia mendapatkan 778 hektare. Adapun pada segmen C500 dan C600, terdapat lahan seluas 405 hektare yang disepakati berada di sisi Malaysia.

Tito menekankan bahwa persoalan perbatasan di Kalimantan Utara ini merupakan warisan sejarah yang berakar dari zaman kolonial, saat Inggris dan Belanda membagi wilayah Pulau Sebatik, Sungai Sinapat, dan Sungai Simantipal hanya di atas peta tanpa adanya pengukuran dan pemasangan patok fisik yang jelas di lapangan.

Akibat dari ketidakjelasan tapal

batas masa lalu itu, kondisi di lapangan menjadi sangat rancu hingga ditemukan kasus unik di mana satu rumah warga berdiri di atas garis batas negara, dengan bagian depan masuk wilayah Indonesia dan bagian belakangnya berada di wilayah Malaysia.

Kondisi perbatasan yang tidak jelas ini tidak hanya memicu sengketa administratif, tetapi juga menjadi celah subur bagi berbagai tindak kejahatan lintas negara (transnational crimes). Tito mengidentifikasi bahwa jalur-jalur penyeberangan ilegal di perbatasan kerap dimanfaatkan untuk aktivitas kriminal mulai dari perdagangan orang (human trafficking), peredaran narkoba (drug trafficking), penyelundupan senjata api (firearms trafficking), hingga penyelundupan berbagai komoditas barang.

Guna menyelesaikan persoalan menahun ini, BNPP terus bergerak secara koordinatif dengan melibatkan tim lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, BIN, Badan Informasi Geospasial (BIG), hingga LAPAN. Selain jalur diplomasi, pemerintah juga terus memperkuat kedaulatan fisik di lapangan melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Hingga saat ini, sebanyak 15 PLBN telah berhasil dibangun, dan pemerintah berkomitmen untuk terus menambah titik PLBN baru di kawasan perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Sarawak, serta titik-titik krusial lainnya di Kalimantan Utara agar celah-celah ilegal dapat sepenuhnya ditutup.

Jejak Sengketa Perbatasan

Persoalan tapal batas di Kalimantan Utara merupakan satu dari sekian banyak catatan panjang diplomasi perbatasan yang harus dihadapi Indonesia sejak merdeka. Sebagai negara kepulauan terbesar yang berbatasan langsung dengan banyak negara, Indonesia tercatat pernah dan masih terus berupaya menyelesaikan beberapa sengketa wilayah krusial lainnya guna menjaga integritas kedaulatan nasional.

Salah satu kasus paling fenomenal dalam sejarah diplomasi Indonesia adalah sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan di lepas pantai timur Kalimantan. Perselisihan dengan Malaysia ini berlangsung sejak tahun 1969 dan akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice). Pada tahun 2002, Mahkamah Internasional memutuskan kepemilikan kedua pulau tersebut jatuh ke tangan Malaysia berdasarkan prinsip efektivitas (pengelolaan praktis yang dilakukan Inggris/Malaysia secara historis), sebuah pelajaran berharga bagi Indonesia untuk lebih memperketat pengawasan fisik di pulau-pulau terluar.

Selain itu, ketegangan wilayah juga kerap terjadi di Laut Natuna Utara. Wilayah perairan ini berulang kali menjadi zona gesekan akibat klaim sepihak sembilan garis putus-putus (nine-dash line) oleh China yang tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Meski Indonesia tidak menganggap diri sebagai pihak yang bersengketa dalam perebutan Kepulauan Spratly, kapal-kapal nelayan dan patroli China yang kerap menerobos masuk membuat Indonesia bersikap tegas dengan mem-perkuat pangkalan militer terintegrasi di Natuna guna menegakkan hukum laut internasional (UNCLOS 1982).

Di batas darat lainnya, Indonesia juga melewati proses negosiasi yang panjang dengan Timor Leste terkait wilayah wilayah enclave (daerah kantong) Oecussi-Ambeno, khususnya di segmen Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan-Oben. Penyelesaian di wilayah ini membutuhkan pendekatan adat dan kekeluargaan antar-warga perbatasan sebelum akhirnya difinalisasi secara hukum antarkedua negara. (wid,rls/dya)

Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026) Tito meluruskan bahwa informasi tersebut sama sekali tidak tepat karena wilayah administratif kedua desa tersebut sepenuhnya tetap berada di bawah panji Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Nah inilah yang mungkin menjadi isu kadang-kadang dikatakan bahwa ada dua desa yang lepas masuk Malaysia. Bukan seperti itu. Yang ada adalah ada bagian tanah dari desa itu yang masuk Malaysia, tapi yang masuk ke Indonesia, dari Malaysia yang masuk Indonesia juga jauh lebih banyak. Jadi kita sebetulnya diuntungkan," ujar Tito meluruskan simpang siur informasi yang beredar.

Mantan Kapolri tersebut memaparkan, berdasarkan dua nota kesepahaman atau MoU yang disepakati kedua negara, pergeseran

BANTUAN MINYAKITA BAU SOLAR, BULOG TARIK DARI PEREDARAN

Perum Bulog bergerak cepat menarik produk Minyakita yang diduga berbau seperti solar dari peredaran. Produk yang menjadi sorotan merupakan Minyakita hasil pengemasan PT Kusuma Mukti Remaja (KMR) yang sebelumnya ditemukan di sejumlah wilayah penerima bantuan pangan, seperti Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri, Jawa Tengah.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan seluruh produk yang terindikasi bermasalah akan ditarik dan diganti dengan Minyakita baru yang memenuhi standar kualitas. Masyarakat yang menemukan produk dengan bau serupa diminta membawa kemasan atau sisa minyak untuk mendapatkan penggantian.

"Bisa (ditukarkan dengan yang baru), silakan. Yang penting bawa packaging-nya, bekasnya, atau yang termasuk masih ada minyaknya yang bau-bau solar itu. Nanti kita ganti dengan yang baru," ujar Rizal dalam konferensi pers di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menurut Rizal, proses penggantian menjadi tanggung jawab PT KMR sebagai pihak pengemas produk tersebut. Seluruh Minyakita yang telah beredar akan ditarik dari pasar dan diganti dengan produk baru yang dinilai lebih layak.

"Penggantinya langsung dari kami, minta dari KMR. Kami ganti totalnya mereka mengeluarkan berapa yang sudah di pasar, tarik semua, diganti dengan yang baru, yang bersih, clean and clear, dan sehat sehingga tidak merugikan pihak masyarakat," katanya.

Bulog sebelumnya melakukan inspeksi mendadak ke fasilitas pengemasan PT KMR setelah menerima laporan masyarakat mengenai dugaan Minyakita berbau solar. Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh proses produksi, mulai dari bahan baku, pengolahan, pengemasan hingga penyimpanan.

Dari hasil pemeriksaan awal, Bulog menemukan kondisi tempat pengemasan PT KMR dinilai tidak memenuhi standar kebersihan. Rizal menyebut fasilitas tersebut belum layak digunakan untuk pengemasan Minyakita.

"Memang kondisi lokasi packaging-nya tidak higienis, tidak bersih, dan kondisinya menurut kami kurang layak untuk dijadikan tempat packaging Minyakita," ujar Rizal.

Atas temuan tersebut, Bulog menghentikan sementara aktivitas pengemasan Minyakita oleh PT KMR dan melakukan evaluasi terhadap perusahaan tersebut. Bulog juga membuka opsi menggunakan mitra pengemasan lain yang dinilai memiliki fasilitas lebih baik.



Sejumlah warga Dukuh Karang, Desa Gading, Tanon memperlihatkan minyakita dari program bantuan pangan pemerintah yang berbau solar. (ist)

"Oleh karena itu kita sudah evaluasi, untuk sementara PT KMR tidak kita berikan tugas lagi untuk packaging Minyakita dan kami rekomendasikan kepada packaging-packaging lain yang kira-kira lebih berkualitas, higienis, dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Rizal.

Selain menarik produk, Bulog juga memerintahkan pengujian laboratorium terhadap sampel Minyakita untuk memastikan penyebab munculnya bau menyerupai solar secara ilmiah. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan.

Produsen Buka Suara, Telah Tarik 300 Ton dan Tunggu Hasil Lab

PT Kusuma Mukti Remaja (PT KMR) akhirnya buka suara terkait keluhan Minyakita yang diduga berbau seperti minyak tanah atau solar di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Sebagai produsen sekaligus pengemas, perusahaan memastikan seluruh produk yang dikeluarkan telah ditarik dari peredaran dan diganti dengan produk baru.

Keluhan tersebut sebelumnya muncul dari penerima bantuan pangan di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Wonogiri, Klaten, Karanganyar, hingga Sragen. Produk yang diterima masyarakat merupakan minyak goreng bantuan dari Bulog dengan kemasan Minyakita ukuran 4 liter.

Direktur PT Kusuma Mukti Remaja Joko Mukti Wijaya mengatakan pihaknya langsung melakukan penarikan setelah menerima laporan dari masyarakat. Tidak hanya produk yang diduga

bermasalah, seluruh minyak goreng yang telah disalurkan turut ditarik sebagai langkah antisipasi.

"Per hari ini kita sudah menarik 100 persen dan mengembalikan minyak goreng yang mungkin bermasalah di tiga kabupaten. Karanganyar, Klaten dan Wonogiri," kata Joko di pabrik PT KMR, Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.

Menurut Joko, jumlah minyak goreng yang diduga bermasalah diperkirakan sekitar 100 ton. Namun, perusahaan memilih menarik jumlah yang lebih besar untuk memastikan tidak ada produk yang masih beredar di masyarakat.

"Yang (minyak goreng) indikasi bermasalah sekitar 100 ton tapi yang kita tarik sampai 300 ton," jelasnya.

Proses penarikan dan penggantian produk dilakukan bersama Bulog, pemerintah daerah, serta perangkat desa atau kelurahan.

"Bulog tidak akan mentolerir produk yang tidak memenuhi standar mutu. Sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, seluruh produk Minyakita produksi PT KMR yang telah terdistribusi kami perintahkan untuk segera ditarik. Selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium agar penyebabnya dapat dipastikan secara ilmiah dan menjadi dasar langkah berikutnya," ujar Rizal.

Rizal menegaskan Bulog akan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran dalam proses produksi maupun distribusi. Pendalaman terhadap PT KMR juga akan dilakukan dan hasilnya akan disampaikan kepada pihak berwenang apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum. (tin,ist,lpt/dya)

Update Program Minyakita per Juni 2026:

Dihapus dari Program Bantuan Pangan

✓ Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa Minyakita tidak lagi digunakan sebagai bagian dari program bantuan pangan atau bansos pemerintah.

✓ Alasan kebijakan: Seluruh pasokan kini difokuskan 100% untuk didistribusikan langsung ke pasar rakyat agar masyarakat umum dapat membelinya dengan lebih mudah.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Tetap Rp15.700

✓ Pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga dan memutuskan untuk mempertahankan HET Minyakita di level Rp15.700 per liter.

✓ Kemendag bersama pemerintah daerah aktif melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar untuk menindak pedagang yang menjual di atas ketentuan HET tersebut.

Kewajiban Distribusi 35% Lewat BUMN

✓ Berdasarkan regulasi teranyar, produsen wajib menyalurkan minimal 35% dari total produksi Minyakita mereka melalui BUMN pangan, yaitu Perum Bulog dan ID Food.

✓ Skema ini diterapkan untuk memperkuat pengawasan pasokan dan memastikan ketersediaan merata hingga ke wilayah Indonesia Timur.



Joko menyebut proses tersebut berjalan lancar karena adanya dukungan dari berbagai pihak di lapangan.

Selain di tiga wilayah tersebut, Joko mengungkapkan keluhan serupa sebelumnya juga sempat muncul di Kabupaten Tegal. Penarikan dan penggantian produk di wilayah itu juga telah diselesaikan. (tin,ist/dya)

Tunggu Restu Pusat, Hilirisasi Garam Pesisir Selatan Belum Terealisasi



Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring melakukan panen garam di Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan. (foto: Dinas Perikanan Kab. Malang)

MALANG - Program hilirisasi garam di wilayah pesisir selatan masih belum bisa terealisasi. Sebab, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang masih menunggu restu dari pusat. Padahal, nilai jual garam produksi di wilayah itu berpotensi naik 3 kali lipat dibanding harga garam krosok saat ini.

"Untuk hilirisasi garam sampai sekarang ini kami masih terus berkomunikasi, karena belum ada

kepastian program hilirisasi garam untuk Kabupaten Malang dari pemerintah pusat," ujar Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring, dikutip pada Senin (29/6/2026).

Disebutkannya, sebagai bentuk kesiapan, Pemkab Malang telah mengusulkan Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, sebagai lokasi proyek hilirisasi garam. Wilayah tersebut dipilih karena menjadi sentra produksi garam krosok dengan sistem tunnel, yang dinilai memiliki kualitas lebih baik.

Victor mengatakan, berdasar data Dinas Perikanan Kabupaten Malang, produksi garam krosok di Desa Sumberoto yang berada di kawasan Pantai Modangan mencapai 30.150

kilogram hingga semester I 2026.

Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan sentra garam lainnya, yakni Pantai Ngantep, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, dengan produksi 3.200 kilogram serta Pantai Perawan, Desa Sidoasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, yang menghasilkan 1.250 kilogram.

"Secara keseluruhan, kami menargetkan produksi garam krosok pada 2026 mencapai 60 ribu kilogram," kata Victor.

Dijelaskannya, hilirisasi akan memberikan nilai tambah karena garam krosok tidak lagi dijual sebagai bahan mentah, melainkan diolah menjadi berbagai produk turunan, seperti garam konsumsi, bahan baku industri makanan dan minuman, farmasi, hingga produk kecantikan.

Menurut Victor, peningkatan nilai jual menjadi salah satu keuntungan terbesar dari program tersebut. Saat ini garam krosok hanya dipasarkan dengan harga sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram.

Sementara itu, setelah diolah menjadi garam konsumsi, harganya dapat

mencapai sedikitnya Rp6.000 per kilogram, bahkan lebih tinggi karena garam hasil produksi sistem tunnel masuk dalam kategori kualitas K1.

"Kalau dalam bentuk garam krosok masih dipasarkan dengan harga Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilogram, sedangkan garam konsumsi yang bahan bakunya dari garam krosok minimal Rp6.000 per kilogram, bahkan bisa lebih karena garam dari tunnel masuk kategori K1," jelasnya.

Karena itu, pihaknya berharap pemerintah pusat dapat segera merealisasikan program hilirisasi garam sehingga potensi ekonomi komoditas tersebut dapat dimaksimalkan.

Sementara itu, pemasaran garam krosok produksi Kabupaten Malang saat ini masih didominasi untuk kebutuhan industri pengolahan garam di Kabupaten Tulungagung. Adapun pasar lokal di Malang sebagian besar dimanfaatkan sebagai garam ternak dan garam untuk pengolahan ikan.

"Pasar lokal di Malang garamnya untuk ternak dan garam ikan," pungkas Victor. (Santi/Dya)

Atasi Keterbatasan Lahan, Pemkot Malang Pertimbangkan KMP Bertingkat

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang membuka peluang penerapan konsep bangunan bertingkat untuk Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih (KMP). Hal ini sebagai solusi keterbatasan lahan di wilayah itu.

"Kami mengikuti saja. Yang penting nanti lahannya bukan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kami mengikuti saja nanti," ujar Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, Senin (29/6/2026).

Eko menyetujui konsep yang sempat disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Malang, dimana pembangunan Gerai KMP tidak harus selalu dilakukan di atas lahan seluas 1.000 meter persegi apabila kondisi di lapangan tidak memungkinkan.

Menurutnya, konsep bangunan vertikal di atas lahan yang lebih kecil dapat menjadi salah satu opsi. "Bisa juga. Tinggal melihat kebutuhan nanti. Karena memang di kota, seperti di Klojen itu mencari lahan 1.000 meter susah. Bisa jadi nanti di lahan yang kecil tetapi bangunannya bertingkat," katanya.

Meski demikian, Eko menegaskan pembangunan fisik nantinya bukan menjadi kewenangan Pemkot Malang. Sebab, pelaksanaan pembangunan akan dilakukan oleh pihak yang telah ditunjuk pemerintah pusat.

"Tetap nanti dari Kodim, karena yang mengerjakan pembangunannya. Bukan dari Pemkot Malang," jelasnya.

Sementara itu, terkait usulan penggunaan sejumlah bidang lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Malang, Eko mengatakan hal tersebut masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

Menurutnya, hingga kini usulan perubahan status sejumlah bidang lahan yang diajukan masih dalam tahap pembahasan.

Diketahui, dari 57 kelurahan di Kota Malang, baru 2 kelurahan yang telah memiliki gerai Kopel Merah Putih, yakni Kelurahan Bandungrejosari dan Kelurahan Arjowinangun.

Saat ditanya mengenai potensi berkurangnya luas RTH maupun Lahan Sawah Dilindungi (LSD) apabila usulan tersebut disetujui, Eko enggan

memberikan tanggapan lebih jauh. Ia menyebut persoalan tersebut merupakan kewenangan perangkat daerah yang membidangi tata ruang.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengusulkan agar pembangunan Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih tidak diterapkan secara kaku dengan syarat lahan seluas 1.000 meter persegi, khususnya di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan ruang.

Menurut perempuan yang akrab disapa Mia itu, yang terpenting adalah program KMP tetap dapat berjalan dengan memanfaatkan aset yang tersedia serta didukung inovasi kebijakan.

Mia mengungkapkan, pihaknya telah berkonsultasi dengan



Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. (foto: ist)

Kementerian Koperasi mengenai kendala penyediaan lahan di wilayah perkotaan. Dari hasil konsultasi tersebut, muncul alternatif pembangunan gerai di atas lahan sekitar 250 meter persegi dengan konsep bangunan vertikal hingga empat lantai.

Meski demikian, Mia mengingatkan konsep tersebut tetap harus dikaji secara komprehensif, terutama menyangkut aksesibilitas bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas. (Santi/Dya)



Usai Gempa Kembar Venezuela **BERPACU DENGAN WAKTU: HAMPIR 1.500 JIWA TEWAS**

Tim penyelamat terus berlomba dengan waktu untuk menemukan korban selamat setelah dua gempa bumi besar mengguncang Venezuela secara beruntun pada Rabu (24/6/2026). Hingga Minggu (28/6/2026), jumlah korban meninggal dunia akibat bencana tersebut mendekati 1.500 orang. Wilayah La Guaira menjadi daerah yang paling parah terdampak.

Puluhan bangunan di kawasan pesisir yang berjarak sekitar 40 kilometer dari Caracas runtuh dan berubah menjadi tumpukan puing. Pemerintah Venezuela menyebut operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung karena peluang menemukan korban hidup belum

tertutup.

“Upaya penyelamatan dan pemulihan sedang berlangsung. Hari ini (Minggu) kami telah menemukan orang-orang yang masih hidup dan, oleh karena itu, operasi tidak dihentikan. Kami selalu mempertahankan harapan,” kata Pelaksana Tugas Presiden Venezuela Delcy Rodriguez dikutip Senin

(29/6).

Rodriguez juga mengumumkan pembentukan komisi kepresidenan untuk menilai kelayakan bangunan yang terdampak gempa. Ia menyebut kegiatan sekolah akan kembali ditunda selama satu pekan, sementara pasokan listrik di La Guaira telah pulih hingga 75 persen.



Keluarga pesepak bola asal Argentina, Lucas Trejo menjadi korban gempa Venezuela.dok

Renggut Nyawa Istri dan 2 Anak Pesepak Bola Argentina Lucas Trejo

keluarganya telah rata dengan tanah. Selama tiga hari, Trejo bersama relawan dan rekan-rekannya berusaha mencari keberadaan istrinya, Yanina, serta kedua anaknya, Aaron dan Ainhoa, di tengah reruntuhan bangunan. Saudara iparnya, Ricardo Ardiles, mengatakan Trejo mengalami pukulan berat setelah melihat kondisi rumahnya yang hancur.

“Apa yang dia temukan adalah pemandangan yang mengerikan. Dia sama sekali tidak menemukan apa pun yang tersisa dari bangunan itu sebelumnya. Harapan kami adalah mereka tidak berada di dalam sana,” ujar Ardiles.

Dalam proses pencarian, keluarga dan relawan juga meminta tambahan alat berat karena peralatan yang tersedia dianggap tidak memadai untuk membongkar reruntuhan.

“Saat ini kami hanya memiliki satu mesin, tetapi itu tidak cukup,” kata Robert Garces, pemain Metropolitanos FC yang ikut membantu pencarian.

Harapan untuk menemukan keluarganya dalam keadaan hidup akhirnya pupus. Pada Minggu (28/6/2026), Club Sport Maritimo La Guaira mengumumkan bahwa Yanina, Aaron, dan Ainhoa meninggal dunia setelah tertimbun reruntuhan selama sekitar 72 jam.

Klub tersebut menyampaikan belasungkawa melalui media sosial. (gus,ist/dya)

Sebelumnya, Jorge Rodriguez, saudara Delcy Rodriguez yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Nasional, menyampaikan jumlah korban meninggal bertambah menjadi 1.450 orang. Selain itu, sekitar 3.150 orang mengalami luka-luka, 12.721 warga mengungsi, dan sebanyak 774 bangunan dilaporkan runtuh.

“Kita berada dalam jam-jam kritis, jam-jam penting untuk terus menyelamatkan nyawa dan membangun kamp-kamp tempat orang-orang yang telah kehilangan rumah mereka, atau yang tidak dapat kembali, karena alasan apa pun, ke tempat tinggal mereka dapat tinggal,” ujar Jorge Rodriguez.

Warga dan relawan lokal telah sehari-hari melakukan pencarian menggunakan peralatan seadanya, mulai dari sekop, tali, alat berat, hingga tangan kosong. Mereka menyisir reruntuhan sebelum bantuan internasional datang. Lebih dari 2.600 personel penyelamat asing kemudian bergabung dalam operasi tersebut.

Namun, muncul kritik dari sejumlah warga yang menilai respons pemerintah, aparat keamanan, dan layanan darurat berjalan lambat. Mereka menyebut minimnya alat berat serta terbatasnya kehadiran petugas resmi membuat proses evakuasi korban terhambat.

Seorang pencari korban, Mileidy Romero, mengungkapkan kekecewaannya saat melakukan pencarian di kawasan Caraballeda.

“Ada tumpukan mayat di sana dari tadi malam. Bayi-bayi yang baru lahir,” kata Romero.

“Pukul 8 malam (kemarin) ada orang yang masih hidup di sana, dan mereka tidak berusaha menyelamatkan mereka. Kami telah menemukan beberapa mayat, dan mereka juga tidak membantu kami untuk mengevakuasinya. Apa yang mereka tunggu?” lanjutnya.

Sementara itu, warga lain bernama Yeison Marcano juga mempertanyakan keterlibatan aparat dalam proses penyelamatan.

“Mereka datang untuk makan arepas dan berfoto agar terlihat seperti sedang bekerja. Seragam mereka bahkan tidak kotor seperti kami. Kami sudah berada di sini selama tiga hari,” ujar Marcano. (gus,rtr,ist/dya)



Sodium Tak Selalu Terasa Asin

Waspadai Roti Tawar hingga Kecap Manis

Hipertensi masih menjadi salah satu ancaman kesehatan yang banyak ditemukan di masyarakat. Penyakit ini sering disebut sebagai silent killer karena dapat berkembang tanpa gejala yang jelas, hingga seseorang baru menyadarinya ketika sudah melakukan pemeriksaan tekanan darah atau mengalami komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, hingga gangguan ginjal.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, dari program Cek Kesehatan Gratis (CKG), sekitar 1 dari 5 peserta diketahui mengalami hipertensi. Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan darah tinggi masih menjadi masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian. Di balik meningkatnya kasus hipertensi, ada kebiasaan sehari-hari yang sering dianggap sepele. Salah satunya adalah konsumsi hidden sodium atau natrium tersembunyi.

Banyak orang mengira sumber natrium hanya berasal dari garam dapur. Padahal, berbagai makanan yang tidak terasa asin juga dapat menyumbang natrium dalam jumlah cukup tinggi.

Roti tawar, kecap manis, mi instan, bubur instan, makanan kalengan seperti sarden, saus, hingga bumbu instan dapat menjadi sumber natrium yang masuk tanpa disadari. Ketika beberapa makanan tersebut dikonsumsi dalam satu hari, total asupan natrium bisa melewati batas yang dianjurkan.

Kementerian Kesehatan RI merekomendasikan konsumsi natrium kurang dari 2.000 miligram per hari, atau setara dengan sekitar satu sendok teh garam. Masalahnya, banyak orang tidak menghitung jumlah natrium dari seluruh makanan yang dikonsumsi. Akibatnya, batas harian tersebut mudah terlampaui.

Penelitian dalam jurnal Current Hypertension Reports tahun 2024 menunjukkan konsumsi natrium berlebih dalam jangka panjang berkaitan dengan peningkatan risiko hipertensi, terutama pada orang yang sensitif terhadap natrium.

Tidak Semua Natrium Berasal dari Garam

Natrium memang dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan, fungsi saraf, dan kerja otot. Namun, jumlah yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah karena membuat tubuh menahan lebih banyak cairan.

Kondisi tersebut dapat meningkatkan beban kerja jantung dan pembuluh darah. Karena itu, bukan hanya rasa asin yang perlu diwaspadai. Makanan dengan rasa manis atau gurih pun bisa mengandung natrium tinggi.

Kurang Buah dan Sayur

Selain terlalu banyak natrium, rendahnya konsumsi buah dan sayur juga dapat berpengaruh terhadap tekanan darah.

Buah dan sayur merupakan sumber kalium, mineral yang membantu tubuh mengeluarkan kelebihan natrium melalui urine serta membantu menjaga pembuluh darah tetap rileks.

Ketika asupan kalium rendah, efek natrium terhadap tekanan darah dapat menjadi lebih besar. Pedoman Gizi Seimbang juga menganjurkan konsumsi buah dan sayur setiap hari untuk memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, serat, dan kalium.

Sejumlah penelitian menunjukkan pola makan yang kaya buah dan sayur, terutama yang tinggi kalium, berkaitan dengan tekanan darah yang lebih terkontrol dan risiko hipertensi yang lebih rendah.

Kurang Bergerak

Gaya hidup minim aktivitas fisik juga menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko hipertensi. Kurangnya gerakan membuat fungsi jantung dan pembuluh darah tidak bekerja secara optimal. Risiko semakin meningkat jika kondisi ini disertai berat badan berlebih.

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan aktivitas fisik intensitas sedang minimal 150 menit per minggu, atau sekitar 30 menit per hari selama lima hari dalam seminggu.

Aktivitas sederhana seperti jalan cepat, bersepeda, berenang, atau pekerjaan rumah yang melibatkan banyak gerakan dapat membantu menjaga tekanan darah. Rutin bergerak terbukti membantu menurunkan tekanan darah sekaligus mengurangi risiko penyakit kardiovaskular.

Kurang Tidur

Selain makanan dan aktivitas fisik, pola tidur juga berperan terhadap kesehatan jantung. Tidur yang terlalu singkat atau kualitas tidur yang buruk dapat mengganggu keseimbangan hormon dan meningkatkan aktivitas sistem saraf yang mengatur tekanan darah.

Akibatnya, tekanan darah lebih sulit kembali normal, terutama jika kondisi ini terjadi dalam jangka panjang. Penelitian dalam jurnal Hypertension Research tahun 2024 menemukan kualitas tidur yang buruk berkaitan dengan peningkatan risiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular.

Waspadai Kebiasaan Kecil yang Terjadi Setiap Hari

Hipertensi sering kali bukan muncul karena satu kebiasaan besar, melainkan akumulasi dari berbagai pola hidup yang berlangsung lama. Terlalu banyak mengonsumsi

makanan tinggi natrium, jarang makan buah dan sayur, kurang bergerak, serta kurang tidur dapat menjadi kombinasi yang meningkatkan risiko. Menjaga tekanan darah bukan hanya soal mengurangi garam. Perlu melihat seluruh pola hidup secara menyeluruh. Karena makanan yang tidak terasa asin pun bisa menyimpan ancaman tersembunyi bernama hidden sodium. (ist/dya)

Dampak Buruk Kelebihan Natrium bagi Kesehatan

Hipertensi kronis:

Volume darah meningkat drastis akibat penahanan air oleh natrium.

Penyakit kardiovaskular:

Kerusakan pembuluh darah meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke.

Kerusakan fungsi ginjal:

Ginjal bekerja ekstra keras menyaring kelebihan elektrolit hingga memicu gagal ginjal.

Batu ginjal:

Kalsium yang ikut terbuang bersama natrium melalui urine dapat mengkristal di ginjal.

Osteoporosis (pengeroposan tulang):

Tubuh kehilangan kalsium dalam jumlah besar karena terbuang melalui urine.

Penurunan fungsi otak:

Kerusakan pembuluh darah otak dapat meningkatkan risiko demensia vaskular.



Blue Hole Langka Ditemukan, Rumah 2.700 Spesies di Laut China Selatan



Laut kembali menunjukkan salah satu misteri terbesarnya. Sebuah blue hole atau lubang laut berwarna biru pekat ditemukan di kawasan terumbu karang Laguna Pulau Huangyan, Laut China Selatan. Temuan ini menarik perhatian karena bukan hanya bentuk geologinya yang langka, tetapi juga kekayaan kehidupan laut yang tersembunyi di dalamnya.

Blue hole merupakan lubang laut alami yang memiliki warna biru gelap karena kedalamannya jauh lebih dalam dibandingkan perairan di sekitarnya. Fenomena ini terbentuk melalui proses alam selama ribuan tahun dan menjadi salah satu ekosistem laut yang unik. Menurut laporan China Daily, survei yang

dilakukan Kementerian Ekologi dan Lingkungan China menemukan lebih dari 2.700 spesies laut hidup di kawasan sekitar blue hole tersebut.

Pemetaan keanekaragaman hayati dilakukan menggunakan teknologi DNA lingkungan atau environmental DNA (eDNA). Teknologi ini memungkinkan ilmuwan mengenali keberadaan makhluk hidup hanya dari jejak genetik yang tertinggal di air, tanpa harus menangkap organisme satu per satu.

Terbentuk Ribuan Tahun Lalu

Blue hole di Huangyan pertama kali diamati oleh tim survei ilmiah pada Agustus 2025. Kajian awal menggunakan metode geokronologi menunjukkan struktur laut tersebut

telah terbentuk setidaknya 3.200 tahun lalu. Bentuknya menyerupai corong dengan bagian dalam yang semakin dalam ke bawah. Luas area bukannya mencapai sekitar 1.491,7 meter persegi, dengan diameter maksimum 56,3 meter dan kedalaman mencapai 16,6 meter.

Keunikan lain dari blue hole Huangyan adalah asal pembentukannya. Secara umum, blue hole terbagi menjadi dua jenis. Pertama, blue hole yang terbentuk akibat proses pelarutan batu kapur.

Kedua, blue hole yang terbentuk dari pertumbuhan dan perkembangan struktur terumbu karang. Jenis kedua inilah yang tergolong lebih langka karena terbentuk melalui proses biologis ekosistem laut.

Kawasan sekitar blue hole Huangyan berada di wilayah terumbu karang yang padat. Lingkungan ini menjadi habitat berbagai organisme laut, mulai dari karang, ikan, spons laut, anemon, hingga kima raksasa.

Survei selama dua tahun mencatat keberadaan 165 spesies karang keras yang berasal dari 14 famili dan mencakup 44 genus. Selain itu, peneliti juga menemukan 184 spesies ikan dari 27 famili yang mencakup 85 genus.

Tidak hanya itu, kawasan tersebut juga menjadi tempat hidup penyuh hijau, salah satu satwa yang dilindungi di China.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kawasan laut yang tampak hanya berupa lubang gelap ternyata menyimpan ekosistem dengan

tingkat keanekaragaman hayati tinggi. Salah satu hal penting dari penelitian ini adalah penggunaan teknologi DNA lingkungan.

Selama ini, penelitian laut sering bergantung pada pengamatan langsung atau penangkapan sampel organisme. Namun teknologi eDNA memberikan cara baru untuk mempelajari kehidupan bawah laut secara lebih luas dan minim gangguan.

Jejak genetik yang tertinggal di air dapat membantu ilmuwan mengetahui keberadaan berbagai spesies, termasuk organisme yang sulit diamati secara langsung. Teknologi ini dinilai penting untuk memahami kondisi ekosistem laut dan menyusun strategi perlindungan kawasan biodiversitas.

Blue hole telah lama menjadi salah satu fenomena laut yang menarik perhatian ilmuwan maupun penyelam. Beberapa blue hole terkenal di dunia memiliki kedalaman ratusan meter dan menjadi objek penelitian karena menyimpan catatan perubahan lingkungan masa lalu.

Namun, blue hole yang terbentuk dari ekosistem terumbu karang memiliki nilai khusus karena keberadaannya sangat terbatas.

Struktur seperti ini tidak hanya menjadi bentang alam unik, tetapi juga berfungsi sebagai tempat berlindung dan berkembang biaknya berbagai spesies laut.

Temuan blue hole Huangyan kembali menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan laut masih belum sepenuhnya terungkap.

Di balik permukaan laut yang terlihat tenang, terdapat jaringan kehidupan yang saling terhubung (ist/dya)





Zodiak dan Gaya Berpakaian: Benarkah Outfit Gambarkan Kepribadian Seseorang?

Bagi sebagian orang, memilih pakaian bukan sekadar mencari apa yang sedang tren. Ada yang memilih outfit karena nyaman, ada yang mengejar tampilan elegan, sementara lainnya menjadikan pakaian sebagai cara menunjukkan karakter diri.

Tak heran jika gaya berpakaian sering dikaitkan dengan kepribadian, termasuk melalui pendekatan zodiak. Meski tidak bisa dijadikan patokan ilmiah mutlak, banyak orang merasa pilihan fashion mereka cukup menggambarkan kebiasaan dan karakter pribadi.

Dalam dunia fasyen modern, pakaian memang semakin dipandang sebagai bentuk ekspresi diri. Cara seseorang berpakaian bisa menjadi bagian dari komunikasi nonverbal, yaitu cara menyampaikan identitas tanpa harus berbicara.

Perkembangan media sosial juga membuat fashion semakin personal. Platform seperti Instagram dan TikTok menjadikan gaya berpakaian sebagai ruang untuk membangun citra diri, mengikuti tren, sekaligus menunjukkan kelompok atau komunitas yang diikuti.

Lantas, bagaimana karakter tiap zodiak jika dilihat dari pilihan outfit?

Aries: Untuk Menunjukkan Kepercayaan Diri

Aries dikenal sebagai pribadi yang berani dan penuh energi. Dalam urusan pakaian, mereka cenderung menyukai tampilan yang mencuri perhatian. Warna berani, model unik, atau item yang sedang populer sering menarik perhatian Aries.

Taurus: Utamakan Kenyamanan dan Kualitas

Taurus biasanya tidak mudah tergoda tren sesaat. Mereka lebih memilih pakaian yang nyaman dengan bahan berkualitas. Bagi Taurus, membeli pakaian bukan soal jumlah, tetapi nilai guna. Satu outfit yang awet dan bisa digunakan dalam berbagai kesempatan dianggap lebih menarik dibanding banyak pakaian yang cepat tergantikan.

Gemini: Suka Berganti Gaya

Gemini dikenal sebagai zodiak yang senang bereksperimen. Mereka mudah mencoba berbagai gaya, mulai

dari feminin, casual, sporty, hingga tampilan yang lebih berani. Lemari Gemini biasanya penuh warna karena mereka menikmati proses mencari gaya baru.

Cancer: Utamakan Rasa Nyaman

Cancer lebih banyak mempertimbangkan perasaan saat memilih pakaian. Mereka cenderung menyukai outfit yang membuat nyaman secara emosional, seperti pakaian dengan potongan lembut, warna tenang, atau model yang memberikan kesan hangat.

Leo: Selalu Ingin Tampil Menonjol

Leo melihat fashion sebagai panggung untuk berekspresi. Mereka tidak ragu memakai pakaian dengan detail unik, aksesoris menarik, atau warna yang membuat perhatian tertuju kepada mereka. Bagi Leo, outfit yang tepat bisa meningkatkan rasa percaya diri.

Virgo: Praktis dan Terencana

Virgo termasuk tipe yang berpikir panjang sebelum membeli pakaian. Mereka biasanya mempertimbangkan

apakah outfit tersebut mudah dipadukan, nyaman dipakai, dan benar-benar dibutuhkan. Model simpel, rapi, dan warna netral sering menjadi pilihan favorit.

Libra: Mengejar Keselarasan dan Estetika

Libra sering dikenal memiliki perhatian besar terhadap tampilan. Mereka menyukai pakaian yang terlihat seimbang, elegan, dan enak dipandang. Bagi Libra, detail kecil seperti perpaduan warna dan aksesoris bisa menentukan keseluruhan gaya.

Scorpio: Memiliki Identitas Gaya Kuat

Scorpio cenderung tidak mudah mengikuti tren. Mereka lebih nyaman dengan gaya yang sudah menjadi ciri khas, seperti tampilan elegan, misterius, atau dominan dengan warna gelap.

Sagittarius: Cari Kebebasan Bergerak

Sagittarius biasanya memilih pakaian yang mendukung aktivitas. Mereka tidak terlalu menyukai outfit yang rumit dan lebih memilih pakaian yang fleksibel untuk berbagai kegiatan. (ist/dya)



Menguliti Angka 43dari hal 1

Kementerian Ketenaga-kerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Juni 2026 telah mencapai sekitar 43.000 kasus. Pemerintah menyebut angka tersebut terus dipantau dan diperbarui sebagai dasar menentukan langkah penanganan agar dampak terhadap pekerja dan dunia usaha dapat ditekan.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan perkembangan angka PHK dipantau secara berkala melalui sistem data ketenagakerjaan yang diterbitkan setiap bulan.

"Hingga Juni tercatat sekitar 43.000 kasus," kata Anwar Sanusi di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menurut Anwar, data tersebut masih terus dilakukan pembaruan dan verifikasi untuk memastikan angka yang disampaikan sesuai dengan kondisi ketenagakerjaan yang sebenarnya.

"Melalui data ketenagakerjaan yang diterbitkan setiap bulan oleh Kemnaker, kami terus memantau pergerakan angka PHK," ujar Anwar.

"Data ini terus kami perbarui dan monitor secara berkala sebagai dasar penyusunan langkah kebijakan," lanjutnya.

Namun, angka 43 ribu kasus PHK tersebut menjadi perhatian karena berpotensi hanya menggambarkan sebagian kondisi yang tercatat dalam sistem resmi. Di lapangan, terdapat pekerja kontrak, pekerja alih daya (outsourcing), hingga sektor usaha kecil yang terdampak pelemahan bisnis namun belum seluruhnya masuk dalam laporan ketenagakerjaan.

Satudata Kemnaker mencatat sepanjang Januari hingga Mei 2026 terdapat 23.470 pekerja yang mengalami PHK. Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi mencapai 5.044 pekerja, kemudian disusul Banten dan Jawa Timur.

Jika angka tersebut dibaca lebih dalam, persoalan PHK tidak hanya berkaitan dengan kehilangan pekerjaan, tetapi juga menggambarkan tekanan terhadap dunia industri, terutama sektor manufaktur yang menjadi salah satu penyumbang terbesar.

Anwar Sanusi mengatakan sektor manufaktur menjadi salah satu sektor yang tengah dipetakan pemerintah karena adanya peningkatan kasus PHK. "Kalau tidak salah, salah satunya memang sektor manufaktur. Namun, data detailnya masih kami cek dan akan kami sampaikan setelah proses verifikasi selesai," ujar Anwar.

Tekanan terhadap manufaktur disebut berkaitan dengan berbagai

faktor, salah satunya tingginya biaya produksi. Harga energi, termasuk gas industri, menjadi salah satu isu yang disoroti karena berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional perusahaan.

Kemnaker saat ini juga mengkaji potensi meningkatnya jumlah pekerja terdampak PHK hingga mencapai 50.000 orang akibat tekanan biaya industri tersebut.

Anwar mengatakan pemerintah masih mendalami masukan dari serikat pekerja mengenai dampak kenaikan harga gas industri terhadap keberlangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja.

"Kami harus melakukan kajian terkait apa yang disampaikan oleh teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh," kata Anwar.

"Yang jelas, kami akan memetakan sektor-sektor yang memberikan kontribusi terhadap meningkatnya jumlah PHK, kemudian menelaah penyebabnya serta menentukan mitigasi yang perlu dilakukan," lanjutnya.

Potensi bertambahnya jumlah pekerja terdampak sebelumnya juga disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyebut sekitar 50.000 pekerja berpotensi terkena PHK apabila

persoalan biaya energi industri tidak segera ditangani.

"Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Jika tidak segera ditangani, ancaman badai PHK bisa terjadi dalam waktu dekat," ujar Andi Gani dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah menegaskan fokus utama bukan hanya mencatat jumlah pekerja yang terdampak, tetapi juga melakukan mitigasi agar PHK dapat dicegah.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat dialog sosial antara pekerja dan perusahaan melalui mekanisme bipartit maupun tripartit.

"Fokus kami bukan hanya memantau data PHK, tetapi bagaimana melakukan mitigasi sebaik-baiknya agar PHK dapat dicegah," kata Anwar.

"Kami mengoptimalkan dialog sosial, baik secara bipartit maupun tripartit, untuk mencari solusi yang terbaik terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan," jelasnya.

Selain upaya pencegahan, Kemnaker juga menyiapkan program perlindungan bagi pekerja yang sudah terdampak PHK. Program tersebut mencakup pelatihan peningkatan kompetensi bagi pencari kerja serta pelatihan kewirausahaan bagi pekerja yang ingin membuka peluang usaha baru.

Harga Gas Industri Turun Jadi US\$13/MMBTU

DI TENGAH meningkatnya kekhawatiran gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan biaya produksi, pemerintah akhirnya mengambil langkah dengan menurunkan harga gas industri berbasis liquefied natural gas (LNG) menjadi US\$13 per MMBTU. Kebijakan tersebut diambil setelah pelaku industri, khususnya sektor keramik, serta serikat pekerja menyampaikan keluhan terkait tingginya biaya energi yang mulai mengancam keberlangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan keputusan penurunan harga gas tersebut merupakan hasil rapat koordinasi pemerintah bersama DPR setelah menerima berbagai masukan dari dunia usaha dan pekerja.

"Hari ini kita melakukan rapat koordinasi dalam rangka merespons dari berbagai dinamika geopolitik yang dikaitkan dengan kebijakan untuk mempertahankan ekonomi nasional kita. Khususnya di sektor gas," ujar Bahlil saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Dalam kebijakan baru tersebut, pemerintah menetapkan beberapa skema harga gas industri. Untuk Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), tarif tetap dipertahankan pada kisaran US\$6,5 hingga US\$7 per MMBTU.

"Untuk HGBT tetap di angka 6,5 sampai dengan 7 dolar per MMBTU dan ini adalah rapat kilat kami dengan Pertamina dengan Pak Simon (Dirut PT Pertamina) dan Pak Arif sebagai Direktur PGN," kata Bahlil.

Sementara untuk industri non-HGBT yang menggunakan gas pipa dari lapangan gas di Pulau Jawa, harga ditetapkan sebesar US\$9,6 per MMBTU.

Persoalan terbesar sebelumnya terjadi pada industri yang menggunakan LNG. Bahlil menjelaskan, penurunan produksi gas dari wilayah Jawa bagian barat menyebabkan sejumlah kawasan industri seperti Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta harus menggunakan pasokan LNG dari wilayah lain seperti Papua, Sulawesi, dan Kalimantan.

Kondisi tersebut membuat harga gas yang diterima industri meningkat

"Mitigasi inilah yang paling penting. Ketika seseorang terkena PHK, bagaimana masa transisinya saat mencari pekerjaan baru, kemudian bagaimana peluang lain yang bisa dimanfaatkan," jelas Anwar.

"Selain diarahkan kembali bekerja, mereka juga bisa memilih mengembangkan usaha melalui program kewirausahaan," lanjutnya.

Anwar menambahkan, pengembangan kewirausahaan membutuhkan dukungan lintas sektor. Karena itu, Kemnaker berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain agar pekerja terdampak PHK mendapatkan akses terhadap pelatihan, pendampingan, serta informasi mengenai peluang usaha. (wud,ist,rls,kcm/dya)

HARGA RATA-RATA ACUAN LNG SPOT ASIA DARI TAHUN KE TAHUN

Tahun 2026 (Saat Ini)

US\$ 15 – US\$ 23

Tahun 2025

US\$ 12,45

Tahun 2024

US\$ 10 – US\$ 12

Tahun 2023

US\$ 13 – US\$ 15

Tahun 2022

US\$ 30 – US\$ 40+

Tahun 2022

US\$ 15 – US\$ 18

PER MMBTU

tajam hingga mencapai US\$20-US\$23 per MMBTU akibat tambahan biaya pengangkutan dan proses regasifikasi.

"Itulah yang menjadi penyebab kenapa teman-teman dari sektor industri meminta pemerintah harus turun tangan," ucap Bahlil.

Pemerintah kemudian melakukan perhitungan ulang terhadap struktur harga tersebut. Bahlil menyebut sebelumnya industri mengusulkan agar harga LNG berada di kisaran US\$15-US\$16 per MMBTU. Namun setelah dilakukan kajian dan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menetapkan harga lebih rendah, yakni US\$13 per MMBTU.

"Tapi setelah kita menghitung dan kami sudah lapor Bapak Presiden diturunkan menjadi USD 13 per MMBTU. Jadi dari USD 20-23 per MMBTU sekarang diturunkan menjadi 13," tegas Bahlil. (tin,ist/dya)

Setelah 5 Calon Manajer Kopdes Meninggal **KEMENHAN UBAH NAMA LATSARMIL, KEGIATAN MILITER DIKURANGI**

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melakukan perubahan besar terhadap pelaksanaan pelatihan bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) setelah lima peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meninggal dunia saat mengikuti rangkaian latihan. Evaluasi yang dilakukan pemerintah membuat istilah Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) tidak lagi digunakan. Kemenhan kini mengganti nama serta pendekatan pelatihan menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, mengatakan perubahan tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan latihan, terutama terkait penyesuaian kegiatan bagi peserta yang berstatus warga sipil.



Ratusan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) saag mengikuti Latsarmil di Brigif 1 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2026).ist.kcm

“Sebagai tindak lanjut evaluasi bersama, Kemhan melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan. Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan

Manajerial, bukan Latsarmil lagi,” ujar Rico, Senin (29/6/2026).

Selain perubahan nama, Kemenhan juga memangkas sejumlah materi yang dinilai berkaitan langsung dengan aktivitas militer.

Materi teknis dan taktis militer dikurangi, termasuk latihan menembak yang sebelumnya menjadi sorotan publik setelah muncul video calon manajer Kopdes memegang senjata.

“Termasuk kegiatan menembak tidak lagi menjadi bagian dari pelaksanaan latihan saat ini. Intensitas kegiatan fisik juga dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil,” kata Rico.

Ia memastikan aktivitas calon manajer yang terlihat membawa senjata tersebut tidak lagi dilakukan setelah evaluasi berjalan.

“Kalau yang ini (calon manajer angkat senjata), saya yakin tidak dilaksanakan setelah evaluasi berjalan. Bisa jadi minggu lalu atau sebelumnya,” tegasnya.

Menurut Kemenhan, fokus pelatihan kini diarahkan pada pembentukan kapasitas yang sesuai dengan tugas calon pengelola koperasi. Peserta tetap diberikan pembekalan terkait kedisiplinan dan kebangsaan, tetapi dengan pendekatan yang berbeda.

Materi yang menjadi fokus antara lain: pembentukan karakter, kepemimpinan, kerja sama tim, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, kedisiplinan, serta kemampuan manajerial untuk mengelola KDKMP dan KNMP.

Perubahan skema pelatihan ini dilakukan setelah lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih meninggal dunia ketika mengikuti pelatihan dalam program SPPI 2026.

Kepala BPSDM Pertahanan Kemenhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan duka cita atas meninggalnya para peserta.

“Menyampaikan dukacita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya lima peserta program SPPI KDKMP KNMP 2026 yang sedang mengikuti pelatihan bela negara dan manajerial,” kata Ketut dalam keterangan sebelumnya.

Pasca kejadian tersebut, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan latihan. Evaluasi tidak hanya mencakup materi pelatihan, tetapi juga aspek kesehatan dan keselamatan peserta.

Kemenhan kemudian menggandeng Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperkuat pengawasan medis selama pelatihan berlangsung.

Langkah evaluasi meliputi penguatan pemeriksaan kesehatan peserta, pemetaan kondisi kesehatan, penyesuaian tingkat aktivitas fisik, perbaikan sistem rujukan, serta deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko.

Meski menuai kritik dan desakan agar dihentikan, pemerintah memastikan program pelatihan tetap berjalan karena kebutuhan tenaga pengelola Koperasi Merah Putih. (wid,ist/dya)

DAFTAR PESERTA YANG MENINGGAL

- Yonanda Muhammad Taufiq**
 - Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja
 - Penyebab: henti jantung (cardiac arrest)
- Anisa Muyassaroh**
 - Dodikjur Rindam VI/Mulawarman, Balikpapan
 - Penyebab: sengatan panas ekstrem (heat stroke)
- Novia Rahmadhani Sihotang (25)**
 - Pusat Bahasa Kodiklatad, Jakarta
 - Meninggal saat mengikuti pelatihan
- Muhammad Rifki Renaldi Gunawan**
 - Peserta keempat yang dilaporkan meninggal
- Nola Dya Sari**
 - RSUD Abdul Aziz Singkawang
 - Meninggal saat menjalani penanganan medis

Anggota DPR Soroti Anggaran Latihan Militer Rp30 Juta/Peserta

sekitar Rp45 juta per peserta. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sementara Rp15 juta dialokasikan untuk pembelajaran substansi koperasi.

“Sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi,” ujar Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).

Ia menjelaskan, skema pelatihan terdiri dari 30 hari latihan militer dan 15 hari pembelajaran materi koperasi. Menurutnya, porsi anggaran terbesar justru terserap untuk kegiatan kemiliteran yang dinilai tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tugas utama seorang manajer koperasi.

Hasanuddin menilai calon pengelola Kopdes bukan dipersiapkan sebagai prajurit, melainkan sebagai pengelola organisasi dan usaha di tingkat desa. “Berdasarkan kriteria pelatihan untuk tujuh hari itu

menghabiskan Rp5 juta per peserta, maka total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per orang,” katanya.

“Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi,” lanjutnya. Menurut Hasanuddin, apabila komponen latihan militer dihapus, negara berpotensi menghemat sekitar Rp30 juta atau dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta.

“Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta,” ujarnya.

Ia juga menghitung potensi penghematan apabila skema tersebut diterapkan kepada seluruh peserta secara nasional yang mencapai 35.476 orang. Menurutnya, penghapusan komponen latihan militer berpotensi menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah. (ist,tin/dya)

POLEMIK pelatihan dasar kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) kembali menjadi sorotan. Selain evaluasi terhadap materi latihan, besaran anggaran untuk kegiatan militer dalam program tersebut ikut dipertanyakan.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P, Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin, mengungkapkan bahwa anggaran yang dialokasikan khusus untuk latihan militer calon manajer Kopdes mencapai sekitar Rp30 juta per orang.

Menurut Hasanuddin, total biaya pelatihan selama 45 hari mencapai